

	News Title : Ini Minyak Goreng Sawit, Bukan Makhluk Halus	
	Media Name : timesindonesia.co.id	Journalist : Ronny Wicaksono
	Publish Date : 14 February 2022	Tonality : Neutral
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Ukay Karyadi (Komisioner KPPU), Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Kanal	Topic : Minyak Goreng



Ini Minyak Goreng Sawit, Bukan Makhluk Halus

Senin, 14 Februari 2022 - 14:45 | 5.83K

Berlangganan GRATIS Kopi TIMES



KOP/TIMES

Sindy Meikasari

Mahasiswa UIN KHAS Jember

@timesindonesia @timesoid

YouTube TIMES TV

Sindy Meikasari, mahasiswa UIN KHAS Jember.

Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JEMBER – Per Januari 2022, harga minyak goreng malambung tinggi tak terkendali. Kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sawit cukup kuat. Terlihat dari penyebaran dan pemasaran migor yang begitu signifikan.

BACA JUGA

- Jangan lupa! Follow Instagram TIMES Indonesia
- Rukyatullah Dalam Konsep Pemikiran Imam Abu Mansur Al-Maturidi
- Konsep Ayat-Ayat Mutasabihat Dalam Perspektif Ilmu Kalam
- Wayang Haram? Sebuah Respon Atas Ceramah Khalid Basalamah
- Catatan Ketua MPR RI Kelangkaan Minyak Goreng dan Kedelai Jangan Berlarut-larut
- MotoGP di Tengah Pesona Mandalika NTB

Menteri Perdagangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mengakhiri bulan Januari disusun dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. HET sebagaimana dimaksud sebesar: Rp 11.500,00 perliter untuk Minyak Goreng Curah, Rp 13.500,00 perliter untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana, dan Rp 14.000,00 perliter untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

Perkembangan kelapa sawit dari tahun ke tahun semakin meningkat. Asosiasi petani sawit (Apkasino Perjuangan) menyikapi Permendag yang menyebutkan 14 ribu per-liter, belum diterapkan secara maksimal.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pertama, setelah diberlakukan Permendag Nomor 6 Tahun 2022, ketersediaan minyak goreng HET 14/liter sangat susah dan langka di pasaran. Kedua, pada kondisi tersebut dalam berapa hari harga TPS, petani merosot sangat tajam. Ketiga, ada pihak-pihak tertentu yang membeli TBS petani. Keempat, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan penyedia minyak goreng dan penyedia Crude palm oil (CPO). Penghambat efektifitas kebijakan subsidi, dari jenis minyak goreng dan ketidaksiapan infrastruktur. Kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga sebagian besar dalam bentuk minyak goreng curah (61,2 persen). Kesiapan infrastruktur perlu melibatkan bulog.

Terlebih lagi masih banyak perkebunan sawit yang diolah oleh perusahaan swasta daripada rakyat. Setiap tahunnya banyak perkebunan kelapa sawit yang ambil alih oleh perusahaan swasta. Beberapa tahun ini, banyak perusahaan swasta yang diakuisisi oleh perusahaan swasta yang lebih besar. Tahun lalu, ada 10 perkebunan sawit yang mengakuisisi perusahaan lain. Proses akuisisi dan merger terkait perusahaan dihandle oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Tercatat ada 7 perusahaan besar yang disoroti oleh KPPU dikarenakan pada perusahaan tersebut, ketika ada kenaikan Crude palm oil (CPO), pelaku penjual minyak goreng menjual produknya dengan harga yang tinggi.

Yang menariknya perusahaan tersebut rata-rata pulau Jawa. KPPU melakukan pendekatan kepada perusahaan itu melalui ranah hukum. Selain itu beberapa kebijakan pemerintah yang dikaji oleh KPPU sehingga disarankan untuk merombak regulasi-regulasi yang ada karena masih banyak regulasi yang menghambat perusahaan minyak untuk berkembang. Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Ukay Karyadi Komisioner KPPU pada jumpa Pers pada Kamis (22/01). Dilatarbelakangi oleh surplus minyak goreng yang memberi sumbangsih yang besar kepada negara. Secara struktural ketimpangan aset harus diatur kembali.

Dalam menyikapi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng sawit di pasaran Bapak Lutfi selaku Menteri Perdagangan justru dengan cepat mengeluarkan afirmasi kebijakan terkait ekspor-impor Crude palm oil (CPO). Untuk kebijakan tersebut, yang pertama DMO (Domestic Market Obligation), perusahaan kelapa sawit wajib menyotok kelapa sawit mentah dari 20 persen atas ekspor yang dilakukan. Kebijakan DMO ini akan sedikit mengurangi pasalnya perusahaan kelapa sawit tidak harus mengekspor 100 persen, ada kebijakan juga reforma agraria. Akan lebih baik, ketika kebijakan-kebijakan telah diambil, pemerintah diharap memantau kebijakan DPO dan DMO dengan teliti.

Terkait apakah adanya DMO-DPO lebih efektif dibandingkan dengan subsidi yang diimplementasikan pada Permendag? Jawabannya adalah dengan melihat minimal 1 bulan ke depan. Pada subsidi akan membutuhkan lintas kementerian. DMO sawit berbeda dengan DMO batubara: batubara jelas pembelinya, satu entitas: PLN, sedangkan DMO sawit tidak. Berpotensi akan meningkatkan harga CPO dunia? Jika ini iya, akan bisa menimbulkan backfire ke Indonesia. Belum lagi nasib petani rakyat, memicu adanya praktik kencing di kebun/ black market.

Beberapa peran pemerintah, KPPU, Kementrian Perdagangan telah mengambil tindakan. Mari bersama kita bersama tetap memantau kondisi darurat ini. Ide alternatif dan kreatif penggunaan minyak goreng dari luar kelapa sawit justru menjadi nilai plus ketika terjadi anomali kelangkaan minyak goreng kelapa sawit ini. Aduan, kritik, dan saran membangun dari pihak manapun menjadi urgensi yang dapat menyelamatkan negara kita.